

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah.

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melaksanakan Kerja Sama atau *Memorial Of Understanding (MOU)* antar daerah dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK).

1. Mitra Kerja MOU.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur Bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

2. Dasar Hukum

Kebijakan dalam pelaksanaan kerjasama didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor : 2303 /HK-03.01/JI/2019 dan Nomor : 479.3/322/Dalduk.III/2019 Tanggal 27 bulan Maret Tahun 2019 bertempat di selyca Hotel Jln. Bhayangkara No. 58 Samarinda Tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di laksanakan di Kabupaten Berau.

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilakukan adalah program kerja Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten / Kota yang menjadi kegiatan bagi bidang – bidang BKKBN perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan bidang – bidang DPPKBP3A sebagaimana berikut :

- a. Sekretariatan.
- b. Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk).
- c. Bidang Keluarga Berencana KR.
- d. Bidang KSPK.
- e. Bidang ADPIN.

4. Nama Kegiatan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

5. Satuan Kerjasama Perangkat Daerah Penyelenggaran Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan DPPKBP3A Kabupaten Berau khususnya di laksanakan oleh beberapa Bidang yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Berau antara lain :

- a. Bidang Pengendalian Penduduk.
- b. Bidang Keluarga Berencana.
- c. Bidan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keterlibatan dari PNS yang melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut adalah Kepala Bidang, Kasi dan Staf yang dapat di lihat dalam table4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
PNS DPPKBP3A Yang Melaksanakan MOU dengan
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama		Jabatan	Pendidikan	Pangkat / Gol
I	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDK				
	1	Diany Syafriani, SAP. MSI	Kabid. Pengendalian Penduduk	Strata 2 (S2)	Penata Tk. I (III/d)
	2	DB. Maulana, SH	Kasi Advokasi dan Pergerakan	Sarjana (S1)	Penata Tk, I (III/d)
	3	Hasanuddin, SE	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	4	Ngadeni, SE	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader KB	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	5	Winda Astuti	Staf Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader KB	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	6	Sri Handayani, S.Gz.M.A.P	Staf Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Strata 2 (S2)	Penata (III/c)
	7	Yuana Berta	Staf Advokasi dan Pergerakan		
II.	BIDANG KELUARGA BERENCANA				
	1	Dr, Hj. Halijah Yasin	Kabid. Keluarga Berencana	Sarjana (S1)	Pembina (IV/a)

	2	Deddi Zamrudi, SP	Kasi Jaminan Pelayanan KB	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	3	H. Masruhin	Kasi Distribusi ALOKON	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
	4	Suwondo	Kasi Pembinaan dan Kesertaan KB	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
	5	A. Mariatul Kiptiah	Staf Pembinaan dan Kesertaan KB	Sarjana (S1)	Penata Muda (III/a)
	6	Zulfikurrahman	Staf Distribusi ALOKON	SLTA	Pengatur (II/c)
	7	Achmad	Staf Jaminan Pelayanan KB	SLTA	Pengatur (II/c)
III	BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA				
	1	Yusriansyah, SE	Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sarjana (S1)	Pembina (IV/a)
	2	Hj. Tuti Eryani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	3	Saniah	Kasi Bina Ketahanan Keluarga	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
	4	Fitriah Kumala, SE	Kasi Bina Ketahanan Remaja	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
	5	Botet Supriadi, A.Md	Staf Bina Ketahanan Keluarga	Diploma III	Penata (III/c)
	6	Juansyah	Staf Bina Ketahanan Remaja	SLTA	Pengatur Tk I (II/d)

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana berdasarkan Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2019 Nomor : SP-DIPA 068.01.2.433042/2019 tanggal 5 Desember 2018. Melalui DIPA satuan kerja perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan Jumlah Anggaran tahun 2019 sebesar Rp.324.275.500,- (Tiga tarus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 20189

9. Sasaran Strategis

- a. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
- b. Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)
- c. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi
- d. Menurunnya kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi (Un met Need)
- e. Meningkatnya peserta Kb Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
- f. Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan

10. Indikator Kinerja

- a. Angka kelahiran total (total fertility rate / TFR) per WUS target Tahun 2019 persentase 2,35 %
- b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR) target 2019 adalah 63,22 %
- c. Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi target 2019 adalah 24,36 %
- d. Persentase kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi (Un Met need) adalah 8,92 %
- e. Persentase Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2019 sebesar 16,14 %
- f. Jumlah peserta KB Aktif tambahan (Additional User) tahun 2019 sebanyak 373 PUS.

11. Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kerjasama antara DPPKBP3A Kabupaten Beraudengan Perwakilan BKKPN Provinsi Kaltim tahun anggaran 2018 dalam Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik dan dapat di kerjakan secara maksimal namun masih adanya permasalahan permasalahan di lapangan yang tak terduga dan tidak terfasilitasinya , permasalahan secara keseluruhan dari semua program kegiatan tersebut antara lain :

Permasalahan yang di hadapi :

1. Penyuluhan kepada Kelompok BKB Pangeran Diulu Kecamatan Gunung Tabur, Kelompok BKB tersebut minta untuk tahun mendatang tempat pelaksanaan penyuluhan

dapat di tempatkan pada balai Kecamatan Tanjung Redeb sehingga dapat menampung seluruh Kader BKB yang ada / Tempat yang memadai.

2. Alat Peraga tumbuh kembang anak (BKB KIT) untuk sarana penyuluhan kader dan Alat Permainan anak yang mendukung tumbuh kembangan Anak
3. Tahun 2018 tambahan pembentukan kampung KB sebanyak 12 Kampung KB di 12 Kecamatan , untuk kecamatan Maratua belum dapat di bentuk hambatan dalam pembentukan dan pembinaan di karenakan dalam kerjasma tersebut tidak terakomodir anggaran untuk biaya perjalanan baik transportasi maupun akomodasi darat dan laut untuk narasumber, lokasi pembentukan di wilayah yang jauh dan mengharuskan menginap.
4. Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum Optimal.
5. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan.
6. Masih tingginya jumlah anak yang di inginkan dari setiap keluarga.
7. Belum optimalnya komitmen stakeholders terhadap program KB dan KR.

Solusi :

1. DPPKBP3A akan bersurat kepada Camat Gunung Tabur untuk peminjaman tempat untuk Penyuluhan BKB setiap di laksanakannya penyuluhan dan pembinaan kader BKB yang berada di sekitark Kecamatan Gunung Tabur.
2. Tahun 2019 melalui dana DAK Fisik akan di Alokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan BKB KIT untuk kebutuhan kelompok BKB.
3. DPPKBP3A akan meninformasikan kepada BKKBN Provinsi Kaltim untuk dapat mengganggu biaya – biaya Akomodasi dan Transpotasi Darat dan Laut untuk perjanjian kerjasama pada tahun 2019.
4. Akan terus melaksanakan sosialisasi melalui Peningkatan Peran Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Toma) dalam promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi dan juga akan terus melaksanakan penguatan akses dan kualitas pelayanan KB jalur Pemerintah, Swasra dan Wilayah Khusus.
5. Melakukan pemantapan pedoman Standar Pelayanan KB di tingkat Faskes dan Provider akan di bentuk.
6. Peningkatan Akses Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di faskes kesehatan dan kelompok kegiatan.
7. Akan dilaksanakannya Sosialisasi Kesehatan Reproduksi di Kampung KB dengan pendekatan 4 Terlalu :
 - a. Terlalu muda melakukan.

- b. Terlalu tua melahirkan.
- c. Terlalu rapat jarak melahirkan.
- d. Terlalu banyak melahirkan.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (LSM, Lembaga Sosial, Universitas) .

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam melaksanakan urusan Perlindungan Perempuan dan anak melakukan hubungan kerja koordinasi dengan beberapa instansi vertikal terkait dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, serta dalam hal pencegahan terjadinya tidak kekerasan terhadap anak juga melakukan koordinasi dengan sekolah dan yayasan yang ada di Kabupaten Berau. antara lain :

1. Forum Koordinasi

DPPKBP3A dengan membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Berau, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, Kepolisian Resort Berau dan Rumah Tahanan Tanjung Redeb, Dengan Nomor : 180/9-PRJJ/HK/2016. Nomor 1018.U6/574/UM.08.4/UI/2016. Nomr: B-1017/Q4.14/GS/06/2016. Nomor : B/12/VI/2016 dan Nomor : W18.ED.UM.01.01-282. Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tanjung Redeb, 30 Juni 2016. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak di tanda tangannya kesepakatan ini oleh para pihak dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

2. Materi Koordinasi

Adapun ruang lingkup koordinasi atau kesepakatan bersama meliputi perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada Anak Bermasalahan Hukum (ABH)

3. Instansi Vertikal yang terlibat

- a. Pemerintah Kabupaten Berau
- b. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau
- d. Kepolisian Resort Berau

e. Rumah Tahanan Tanjung Redeb

4. Satuan Kerjasama Perangkat Daerah Penyelenggaran Koordinasi dengan instansi vertikal

Koordinasi instansi vertikal dengan DPPKBP3A Kabupaten Berau khususnya di laksanakan oleh Bidang yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Berau antara lain :

- Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keterlibatan dari PNS yang melaksanakan Koordinasi instansi vertikal tersebut adalah Kepala Bidang, Kasi dan Staf yang dapat di lihat dalam table 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
PNS DPPKBP3A Yang Melaksanakan Koordinasi dengan
Instansi Vertikal

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pangkat / Gol
I	BIDANG Perlindungan Perempuan dan Anak			
1	Yayuk Yuliarti, Si. Apt	Kabid. PPA	Sarjana (S1)	Pembina (IV/a)
2	Risdauli Sinaga, S.Si.M.Si	Kasi Tumbuh Kembang Anak	Starata (S2)	Pembina (IV/a)
3	Dra. Hj. Mariusnah	Kasi Perlindungan Anak	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d)
4	Helmadawati, SE	Kasi Perlindungan Perempuan	Sarjana (S1)	Penata Tk. I (III/d))
5	Ernawati, SE	Staf Kasi Perlindungan Anak	Sarjana (S1)	Penata Muda (III/a)
6	Ari Usman	Staf Kasi Perlindungan Perempuan	SLTA	Pengatur (II/c)